**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN**

**DANA DEKOSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**THESIS**

**Disusun dalam rangka memenuhi syarat Ujian Sidang Thesis guna memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada Konsentrasi Kebijakan Publik**

 **Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik**

**Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung**

**Oleh:**

**ENDI ROHENDI**

**NPM: 158010008**



**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG 2016**

**ABSTRAK**

Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu pengelolaan dana dekonsentrasi yang masih belum maksimal. Hal ini diduga disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan implementasi kebijakan pengelolaan dana dekonsentrasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Menuru Irawan (2006:5) metode kualitatif disebut sebagai*‘Naturalinguiry* (karena konteksnya yang natural, bukan artifisial), atau *Interpretive inguiry* (karena banyak melibatkan faktor-faktor subyektif baik dari informan, subjek peneliti itu sendiri).

Dalam pengelolaan dana dekonsentrasi di suatu instansi pemerintahan tentunya sangat memerlukan sistem dam mekanisme yang baik. Untuk pengelolaan yang baik ini harus ada sistem kerja yang baik agar upaya yang dilakukan bisa berjalan secara sinkron dengan perencanaan dan berjalan secara konsisten. Tidak terkecuali pada Dinas Keehatan Provinsi Jawa Barat, peran pemerintah dalam pengelolaan dana dekonsentrasi sangat diperlukan.

Dari penemuan yang didapat oleh peneliti melalui observasi dan wawancara diantaranya. *Pertama,* kondisi lingkungan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah baik dari kondisi sosial, kultural dan penerima program dalam upaya pengelolaan dana dekonsentrasi. *Kedua,* hubungan antar organisasi sudah baik dalam mendukung Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 248/PMK.07/2010 Pengelolaan Dana Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. *Ketiga,* sumber daya untuk Pengelolaan Dana Dekonsentrasi sudah mengerti dalam pengelolaan dana dekosentrasi namun perlu pengawasan yang berjenjang. Sarana sudah ada ada tapi belum secara maksimal untuk mendukung pengelolaan dana dekosentrasi. *Keempat,* karakteristik dan kemampuan agen pelaksana implementasi kebijakan khususnya dalam pengelolaan dana dekonsentrasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah bagus. Meskipun ada beberpa hal yang harus ditingkatkan untuk mendukung implementasi kebijakan dana dekonsentrasi. Diperkuat dengan hasil analisa SWOT menujukan Dinas Kesehataan Provinsi Jawa Barat berada Kuadran I (positif, positif) yang menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang.

Selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah baik, namun masih ada kekurangan yang memerlukan perhatian.

*Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Dana Dekonsentrasi..*

**ABSTRACT**

The main problem of this study is the poor management of deconcentration funds. This is allegedly caused by the implementation of deconcentration fund management policy in the West Java Provincial Health Office that has not been maximized.

Researchers use qualitative research methods. Irawan (2006: 5) states that the qualitative method is a natural inquiry (it is natural, not artificial) or Interpretive inquiry (involving many subjective factors from informants and the researcher).

Deconcentration fund management requires good systems and mechanisms. West Java Provincial Health Office requires good systems and mechanisms to be supported by a good working system so that the management of the funds can be implemented in accordance with the plan and consistent.

the results of observations and interviews, those are First, the condition of the environment in West Java Provincial Health Office is good. Second, the existence of inter-organizational cooperation is good on the implementation of Minister of Finance Regulation No. 248 of 2010 on Deconcentration Fund Management at West Java Provincial Health Office. Third, the results of the interviews show that West Java Provincial Health Office already understands about the management of deconcentration funds. It means that existing facilities are not relevant to the implementation of deconcentration funds. Fourth, the characteristics and capabilities of implementing deconcentration fund management policy in West Java Provincial Health Office is good. Nevertheless, there are some characteristics and capabilities of implementers that need to be improved to support the implementation of deconcentrated funds policy. Reinforced by SWOT analysis shows West Java Provincial Health Office is Quadrant I (positive, positive) which indicates a strong and potent organization.

The conclusion of this research is the implementation of Deconcentration Fund Management Policy in West Java Provincial Health Office is good but still has many shortcomings and that require attention.

## Keywords: Policy Implementation, Deconcentration Fund Management